

Politik Identitas Berbasis Agama dalam Kontestasi Politik Lokal di Kota Sorong

Agus Sukrisman¹, Muhammad Yusuf Bahar²

¹Prodi Pedagogik, FKIP, Universitas Muhammadiyah Sorong

²Prodi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong

Email:

Abstrak

Fenomena politik identitas berbasis agama semakin menguat dalam dinamika politik lokal di Indonesia, khususnya pada wilayah dengan karakter masyarakat yang multikultural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik identitas berbasis agama dimanfaatkan dalam kontestasi politik lokal di Kota Sorong serta implikasinya terhadap proses demokrasi dan kohesi sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktor politik, tokoh agama, penyelenggara pemilu, dan masyarakat, serta didukung oleh observasi dan analisis dokumen terkait kontestasi politik lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agama kerap dijadikan simbol dan instrumen mobilisasi politik untuk membangun basis dukungan elektoral, terutama melalui narasi moral, kedekatan emosional, dan legitimasi kepemimpinan. Di sisi lain, praktik politik identitas berbasis agama berpotensi memperkuat solidaritas kelompok, namun juga memunculkan risiko polarisasi sosial apabila tidak dikelola secara inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik identitas berbasis agama di Kota Sorong merupakan realitas politik yang tidak terpisahkan dari konteks sosial-budaya masyarakat, sehingga diperlukan penguatan etika politik, dialog antaragama, dan komitmen aktor politik terhadap nilai-nilai demokrasi substantif untuk menjaga stabilitas dan harmoni sosial dalam politik lokal.

Kata kunci: politik identitas, agama, politik lokal, demokrasi, Kota Sorong.

Pendahuluan

Demokratisasi di tingkat lokal pasca-reformasi telah membuka ruang partisipasi politik yang semakin luas bagi masyarakat Indonesia. Namun, dinamika tersebut juga memunculkan fenomena menguatnya politik identitas, khususnya yang berbasis agama, dalam berbagai kontestasi politik lokal. Politik identitas tidak lagi sekadar menjadi ekspresi kultural atau keagamaan, melainkan telah berkembang menjadi strategi politik yang digunakan aktor politik untuk membangun dukungan, legitimasi, dan loyalitas pemilih. Sejumlah kajian mutakhir menunjukkan bahwa politik identitas berbasis agama cenderung menguat pada masyarakat yang plural dan memiliki ikatan sosial-keagamaan yang kuat (Mietzner & Muhtadi, 2018; Hadiz, 2016).

Agama memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Indonesia. Selain berfungsi sebagai sistem kepercayaan, agama juga berperan sebagai sumber nilai moral, etika publik, serta identitas kolektif yang berpengaruh terhadap perilaku politik masyarakat. Dalam konteks elektoral, simbol, narasi, dan figur keagamaan kerap digunakan untuk membangun citra kepemimpinan yang bermoral dan dekat dengan rakyat. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan simbol dan isu keagamaan dalam politik lokal dapat meningkatkan elektabilitas kandidat, namun sekaligus berpotensi mempersempit ruang demokrasi apabila dimanfaatkan secara eksklusif dan polaristik (Warburton & Aspinall, 2019; Fossati & Mietzner, 2019).

Fenomena politik identitas berbasis agama semakin relevan untuk dikaji dalam konteks politik lokal di daerah multikultural seperti Kota Sorong. Kota ini merupakan ruang sosial yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang agama, etnis, dan budaya yang beragam, sehingga interaksi antara agama dan politik menjadi sangat dinamis. Dalam kondisi demikian, agama tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan moral dan perekat sosial, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen mobilisasi politik dalam kontestasi kekuasaan lokal. Penelitian-penelitian mutakhir tentang politik lokal di kawasan Indonesia Timur menunjukkan bahwa faktor agama dan tokoh keagamaan memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk preferensi politik masyarakat (McRae, 2018; Pamungkas, 2020).

Di sisi lain, praktik politik identitas berbasis agama juga menimbulkan dilema demokrasi. Di satu sisi, ia dapat memperkuat partisipasi politik dan representasi nilai-nilai moral dalam pemerintahan. Namun di sisi lain, apabila tidak dikelola secara inklusif, politik identitas berpotensi memicu fragmentasi sosial, polarisasi antar kelompok, serta melemahkan kohesi sosial dan kualitas demokrasi lokal (Liddle & Mujani, 2021; Power, 2018). Oleh karena itu, kajian tentang politik identitas berbasis agama perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi multikultural yang menekankan toleransi, inklusivitas, dan etika politik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana politik identitas berbasis agama bekerja dalam kontestasi politik lokal di Kota Sorong, aktor-aktor yang terlibat, serta implikasinya terhadap demokrasi dan harmoni sosial masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi politik lokal dan administrasi publik, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi perumusan strategi politik yang etis, inklusif, dan berorientasi pada penguatan demokrasi lokal.

Kerangka Teori

1. Politik Identitas

Konsep politik identitas merujuk pada praktik politik yang menjadikan identitas sosial—seperti agama, etnis, ras, atau budaya—sebagai basis utama dalam mobilisasi dukungan politik. Menurut Castells (1997), politik identitas muncul sebagai respons terhadap ketidakpastian sosial dan ketimpangan struktural, di mana kelompok tertentu membangun solidaritas berbasis identitas untuk memperjuangkan kepentingannya. Dalam konteks politik elektoral, identitas tidak hanya menjadi penanda sosial, tetapi juga instrumen strategis untuk memperoleh legitimasi dan kekuasaan (Heyes, 2020).

Di tingkat lokal, politik identitas cenderung lebih menguat karena kedekatan emosional antara aktor politik dan masyarakat, serta kuatnya ikatan sosial-komunal. Hal ini menjadikan agama sebagai identitas yang mudah dimobilisasi, terutama dalam masyarakat multikultural yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap nilai-nilai keimanan dan simbol religius.

2. Agama dalam Politik

Agama memiliki posisi ambivalen dalam politik. Di satu sisi, agama berfungsi sebagai sumber nilai moral, etika publik, dan pedoman kepemimpinan yang menekankan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umum (Rawls, 1997). Di sisi lain, agama juga berpotensi dijadikan alat legitimasi politik yang bersifat eksklusif apabila dimanfaatkan secara instrumental oleh elite politik (Fox, 2018).

Casanova (1994) menjelaskan bahwa dalam ruang publik modern, agama tidak sepenuhnya terpisah dari politik, melainkan hadir sebagai kekuatan sosial yang dapat memengaruhi kebijakan, perilaku pemilih, dan wacana politik. Dalam konteks politik lokal, keterlibatan

tokoh agama dan penggunaan simbol keagamaan sering kali menjadi sarana efektif untuk membangun kepercayaan publik dan memperluas basis dukungan elektoral.

3. Politik Lokal dan Demokrasi Multikultural

Politik lokal merupakan arena penting bagi praktik demokrasi karena bersentuhan langsung dengan realitas sosial masyarakat. Menurut Smith (2001), demokrasi lokal menuntut adanya partisipasi, inklusivitas, dan pengakuan terhadap keberagaman identitas sosial. Dalam masyarakat multikultural seperti Kota Sorong, perbedaan agama merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari dan harus dikelola secara demokratis.

Parekh (2008) menekankan bahwa politik dalam masyarakat multikultural memerlukan pendekatan dialogis dan inklusif agar identitas tidak berubah menjadi sumber konflik. Politik identitas berbasis agama, apabila dikelola secara etis dan inklusif, dapat memperkuat kohesi sosial. Namun, apabila dimanfaatkan secara eksklusif, praktik tersebut berpotensi menimbulkan polarisasi dan melemahkan kualitas demokrasi lokal.

4. Etika Politik dan Tata Kelola Demokratis

Etika politik menjadi kerangka normatif penting dalam mengendalikan praktik politik identitas berbasis agama. Menurut Weber (1946), politik idealnya dijalankan dengan menggabungkan etika keyakinan (*ethic of conviction*) dan etika tanggung jawab (*ethic of responsibility*). Dalam konteks ini, aktor politik dituntut tidak hanya memperjuangkan kepentingan elektoral, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan persatuan masyarakat.

Good governance dalam politik lokal mensyaratkan adanya komitmen terhadap nilai keadilan, toleransi, dan non-diskriminasi (UNDP, 1997). Oleh karena itu, penguatan etika politik berbasis nilai-nilai agama yang inklusif menjadi kunci dalam menjaga harmoni sosial serta keberlanjutan demokrasi lokal di Kota Sorong.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena politik identitas berbasis agama, termasuk makna, strategi, dan praktik yang dilakukan oleh aktor politik serta respons masyarakat dalam kontestasi politik lokal. Studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi fenomena tersebut secara kontekstual dalam realitas sosial-politik Kota Sorong yang bercirikan masyarakat multikultural.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Sorong dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki tingkat keberagaman agama dan etnis yang tinggi serta dinamika politik lokal yang relatif intens dalam setiap kontestasi elektoral. Kondisi tersebut menjadikan Kota Sorong sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji praktik dan implikasi politik identitas berbasis agama dalam politik lokal.

Hasil dan Pembahasan

1. Agama sebagai Instrumen Mobilisasi Politik Lokal

Temuan awal penelitian menunjukkan bahwa agama memiliki peran signifikan sebagai instrumen mobilisasi politik dalam kontestasi politik lokal di Kota Sorong. Aktor politik secara aktif memanfaatkan simbol, narasi, dan ruang-ruang keagamaan—seperti kegiatan ibadah, pertemuan tokoh agama, dan perayaan hari besar keagamaan—untuk membangun kedekatan

emosional dengan pemilih. Praktik ini tidak selalu dilakukan secara eksplisit dalam bentuk kampanye formal, melainkan melalui pendekatan kultural dan moral yang lebih halus.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Castells (1997) yang menyatakan bahwa identitas, termasuk identitas agama, merupakan sumber daya politik yang kuat dalam membangun solidaritas dan legitimasi. Dalam konteks politik lokal, kedekatan sosial antara kandidat dan masyarakat memperkuat efektivitas mobilisasi berbasis agama, sebagaimana juga ditegaskan oleh Mietzner dan Muhtadi (2018) bahwa identitas keagamaan kerap menjadi alat konsolidasi dukungan elektoral di tingkat lokal.

2. Peran Tokoh Agama dalam Kontestasi Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki posisi strategis dalam dinamika politik lokal. Tokoh agama tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai opinion leader yang memengaruhi preferensi politik masyarakat. Dukungan simbolik maupun pernyataan moral dari tokoh agama tertentu sering kali ditafsirkan oleh masyarakat sebagai bentuk legitimasi religius terhadap kandidat politik.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif Casanova (1994) yang menyatakan bahwa agama dalam ruang publik modern tidak sepenuhnya terpisah dari politik, melainkan berinteraksi secara dinamis. Dalam masyarakat multikultural seperti Kota Sorong, keterlibatan tokoh agama dalam politik lokal menunjukkan bahwa agama berfungsi sebagai modal sosial politik (social political capital) yang dapat memperkuat posisi kandidat, tetapi sekaligus menimbulkan risiko politisasi otoritas keagamaan.

3. Politik Identitas dan Polarisasi Sosial

Temuan lapangan juga mengindikasikan bahwa praktik politik identitas berbasis agama berpotensi memunculkan polarisasi sosial, terutama ketika narasi keagamaan digunakan secara eksklusif untuk membedakan “kelompok kami” dan “kelompok mereka”. Polarisasi ini tidak selalu muncul dalam bentuk konflik terbuka, tetapi lebih sering tampak dalam segregasi preferensi politik, perbincangan publik yang sensitif, serta meningkatnya sentimen primordial di ruang sosial.

Temuan ini mendukung argumen Parekh (2008) dan Warburton dan Aspinall (2019) yang menyatakan bahwa politik identitas dalam masyarakat multikultural dapat melemahkan kualitas demokrasi apabila tidak dikelola secara inklusif. Politik identitas berbasis agama, ketika diarahkan untuk kepentingan elektoral semata, berpotensi menggeser orientasi politik dari kepentingan publik menuju loyalitas kelompok.

4. Agama, Etika Politik, dan Demokrasi Lokal

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian aktor politik dan tokoh agama memaknai keterlibatan agama dalam politik sebagai upaya menghadirkan etika dan moralitas dalam kepemimpinan lokal. Nilai-nilai keagamaan seperti keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial sering dijadikan landasan normatif dalam membangun citra kepemimpinan yang ideal. Dalam konteks ini, agama diposisikan sebagai sumber etika politik, bukan sekadar alat mobilisasi elektoral.

Temuan ini dapat dianalisis melalui konsep etika politik Weber (1946), khususnya keseimbangan antara etika keyakinan dan etika tanggung jawab. Ketika nilai-nilai agama digunakan secara inklusif dan bertanggung jawab, agama berpotensi memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Namun, apabila nilai

tersebut dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan, maka agama justru berkontribusi pada degradasi etika politik.

5. Implikasi terhadap Tata Kelola Politik Lokal

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas berbasis agama merupakan realitas yang tidak terpisahkan dari kontestasi politik lokal di Kota Sorong. Praktik ini memiliki dua sisi: di satu sisi mampu meningkatkan partisipasi politik dan kedekatan antara pemimpin dan masyarakat, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan polarisasi sosial dan melemahkan prinsip demokrasi substantif.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, temuan ini menegaskan pentingnya penguatan etika politik, dialog antaragama, serta komitmen aktor politik terhadap prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi. Hal ini sejalan dengan pandangan UNDP (1997) dan Liddle dan Mujani (2021) yang menekankan bahwa demokrasi lokal yang sehat harus mampu mengelola keberagaman identitas secara adil dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik identitas berbasis agama merupakan fenomena yang nyata dan signifikan dalam kontestasi politik lokal di Kota Sorong, di mana agama tidak hanya berfungsi sebagai sumber nilai moral dan etika publik, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mobilisasi dukungan politik melalui simbol, narasi, dan jejaring keagamaan. Peran tokoh agama terbukti memiliki pengaruh kuat dalam membentuk preferensi politik masyarakat dan memberikan legitimasi moral terhadap kandidat tertentu, yang pada satu sisi dapat memperkuat solidaritas sosial dan partisipasi politik, namun pada sisi lain berpotensi memunculkan polarisasi dan fragmentasi sosial apabila dimanfaatkan secara eksklusif. Secara teoretis, temuan ini menegaskan sifat ambivalen politik identitas berbasis agama dalam demokrasi lokal: mampu memperkaya praktik demokrasi melalui penguatan etika kepemimpinan, tetapi sekaligus berisiko menggeser orientasi politik dari kepentingan publik menuju loyalitas primordial. Oleh karena itu, keberlanjutan demokrasi lokal di Kota Sorong sangat ditentukan oleh kemampuan aktor politik dan tokoh agama dalam mengelola peran agama secara inklusif, etis, dan bertanggung jawab, melalui penguatan dialog antaragama serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi substantif dan harmoni sosial.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's troubling elections: Nondemocratic pluralism in Indonesia. *Journal of Democracy*, 30(4), 104–118.
- Casanova, J. (2018). *Global religious and secular dynamics: The modern system of classification*. Brill.
- Fossati, D., & Mietzner, M. (2019). Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case. *Electoral Studies*, 63, 102111.
- Fox, J. (2018). *Religion and politics in the twenty-first century*. Routledge.
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.

- Liddle, R. W., & Mujani, S. (2021). Leadership, party, and religion: Explaining voting behavior in Indonesia. *Asian Survey*, 61(2), 225–250.
- McRae, D. (2018). Pluralism and religious politics in Eastern Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 40(3), 406–430.
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist mobilisation in Indonesia: Religious intolerance, militant groups and the politics of accommodation. *Asian Studies Review*, 42(3), 479–497.
- Pamungkas, S. (2020). *Politik identitas dan pilkada di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Parekh, B. (2018). *A new politics of identity: Political principles for an interdependent world* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Power, T. P. (2018). Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307–338.
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia's democratic regression: Structure, agency and popular opinion. *Journal of East Asian Studies*, 19(3), 255–285.
- Weber, M. (2019). *Politics as a vocation* (D. Owen & T. Strong, Eds.). Hackett Publishing.
- Yilmaz, I., & Bashirov, G. (2018). The AKP after 15 years: Emergence of Erdoganism in Turkey. *Third World Quarterly*, 39(9), 1812–1830.
- Zuhro, R. S. (2021). Demokrasi, politik identitas, dan kohesi sosial di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 141–156.